

Media Online	Tribun Timur
Tanggal	Senin, 21 Juli 2025
Wilayah	Provinsi Sulawesi Selatan



Data Pusat dan Daerah Tak Sinkron, Jumlah Penerima PBI di Sulsel Kurang 300 Ribu Orang



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Jumlah penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dikurangi hingga 300 ribu orang. Hal ini terjadi akibat rasionalisasi data yang dilakukan di tingkat pusat. PBI JKN merupakan program bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdata secara nasional. Program ini berbeda dengan PBI yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel, yang bersifat *sharing cost* bersama pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Sulsel saat ini juga tengah melakukan rasionalisasi terhadap data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Akibatnya, penyaluran PBI dari APBD Provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota sementara dihentikan.

Tak hanya di level provinsi, kebijakan rasionalisasi serupa juga terjadi di tingkat pusat. Pemerintah pusat melakukan evaluasi data seiring peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Migrasi data ini bertujuan untuk menyusun basis data penerima bantuan sosial yang lebih akurat dan menyeluruh. Ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya pengurangan jumlah penerima PBI JKN di Sulsel. Kepala Dinas Sosial Sulsel Abdul Malik Faisal mengatakan, awalnya data PBI JKN bersumber dari DTKS. Data masyarakat miskin di Sulsel berdasarkan DTKS berjumlah 4,6 juta orang. Sementara ketika telah bermigrasi ke DTSEN, dilakukan perangkingan status sosial masyarakat mulai dari Desil 1 hingga Desil 10. "Khusus Sulsel waktu DTKS data miskin dan potensi miskin itu 4,6 juta lebih, pada saat migrasi data ke DTSEN itu menjadi 4,3 juta, hilang 300 ribu," katanya, Minggu (21/7/2025). Saat ini, kata Malik, target penerima PBI JKN berkurang 300 ribu, namun dari dulu kuota penerima asal Sulsel sudah melampaui maksimal. Kuota yang ditetapkan sebanyak 2,9 juta penerima dan saat ini terdapat 3,3 juta masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan atau melampaui sebanyak 400.000 orang. "Ada beberapa kabupaten melampaui, karena Kepala Dinas Sosialnya rajin mengurus, nah sekarang dirasionalkan ki, makanya turun. Jadi yang kita bicarakan ini PBI JKN, itu cuma dirasionalkan," ungkapnya. Selain itu, rasionalisasi data tersebut bukan lah masalah, pasalnya pemerintah daerah juga memiliki program PBI BPJS Kesehatan.

Melalui APBD kabupaten/kota, pelayanan kesehatan gratis masyarakat tetap terakomodasi. Apalagi, kata Malik, terakumulasi karena penerima PBI JKN dan daerah adalah data yang sama. Program PBI daerah merupakan upaya untuk meraih UHC. "Kan ini terbagi-bagi, kalau ini yang hilangkan secara keseluruhan, kalau dipisah-pisah kan terbagi-bagi, ada yang 30 ribu, sama seperti Gowa kalau tidak salah hampir 90 ribu overnya," ujarnya. "Ada PBI yang bersumber dari APBN, ada dari APBD, penerimanya sama, karena dia harus orang miskin atau miskin ekstrem," tambah dia. Diketahui, saat ini Pemprov Sulsel masih menahan anggaran Rp325 miliar untuk PBI BPJS Kesehatan. Dana *sharing* itu belum disalurkan karena Pemprov masih memvalidasi data berdasarkan rekomendasi atas temuan BPK pada LHP APBD tahun 2024 terkait penerima bantuan iuran tersebut.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, Pemprov melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan masih dalam tahap verifikasi dan validasi data. Dinas Sosial kabupaten/kota perlu merampungkan DTSEN agar dapat mengetahui jumlah keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan PBI. "Kenapa verval? Karena ternyata data yang ada di BPJS kesehatan dengan data yang ada di provinsi dan kabupaten tidak sinkron, karena itu verifikasi dan validasi dilakukan supaya seragam, ada persamaan data," katanya. "Datanya kan di daerah, mereka yang melakukan updating, pembaharuan, pemutakhiran data setiap saat di dinas sosial kabupaten kota dan Sulsel," tambah dia. Data dari kabupaten/kota akan menjadi agregat bagi data milik Pemprov Sulsel. Selanjutnya, data tersebut akan dicocokkan dengan data milik BPJS Kesehatan. Setelah semuanya rampung, kata Jufri, Pemprov Sulsel akan segera melakukan pembayaran *sharing* tersebut. "Secepatnya,

lebih cepat lebih baik. Tapi yang namanya verifikasi dan validasi kan tidak boleh kita kasih target, karena mencocokkan itu agak ribet. Tidak perlu kita kasih target, pokoknya dikatakan lebih cepat lebih baik," jelasnya.(*)